

KEPEMIMPINAN NASIONAL SEBUAH TANTANGAN (ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN)



Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos., Sp.1., M.M.
(Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Unpas)

Pendahuluan

Tema kepemimpinan merupakan topik yang selalu menarik untuk diperbincangkan dan tidak akan pernah habis untuk dibahas. Masalah kepemimpinan akan selalu hidup dan akan digali pada setiap zaman, dari generasi ke generasi guna mencari formulasi sistem kepemimpinan yang aktual dan tepat untuk diterapkan pada zamannya. Hal ini mengindikasikan bahwa paradigma kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat dinamis, urgen, dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Paradigma kepemimpinan ini juga diperkuat oleh suatu pendapat yang ditulis Graen (1976) dan Cashman (1975) yang menyatakan bahwa kepemimpinan sebagai suatu *proses* di mana individu belajar tentang posisinya dari waktu ke waktu dan beradaptasi serta memperoleh pengetahuan pada pekerjaan sebagai suatu pengalaman

Dalam kerangka kehidupan kenegarawan, seorang pemimpin nasional di Indonesia akan dihadapkan kepada permasalahan yang sangat kompleks. Pada dasarnya tidak akan terlepas dari Tujuan Nasional (Tunas) yang tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tentu saja dengan segala dinamikanya baik nasional, regional, maupun internasional.

Beberapa permasalahan bangsa yang dimaksud, antara lain di bidang

ekonomi mencakup masalah pengangguran, lapangan kerja, kemiskinan, investasi negatif, hutang dalam negeri dan luar negeri, ketahanan pangan yang masih rentan, derajat kesehatan masyarakat yang relatif rendah, serta anggaran dan kualitas pendidikan yang masih belum memadai. Di bidang politik ditandai dengan semakin maraknya KKN, permainan politik uang, ancaman terhadap ideologi Pancasila, tatanan politik yang belum baik, degradasi moral dan etika politik, serta penegakan hukum dan HAM yang masih lemah. Di bidang Hankam, masih rawannya ancaman bahaya disintegrasi, kriminalitas yang masih tinggi baik kualitas maupun kuantitasnya, meluasnya peredaran narkoba serta penyelundupan dan perdagangan ilegal yang sulit diberantas termasuk korupsi dan melemahnya idealisme dan nasionalisme

Pembahasan

Saat ini, kita masih menghadapi permasalahan-permasalahan yang fokus utamanya masih berpusat di sekitar bidang politik dan ekonomi, serta keamanan negara yang kondisinya masih rawan dan rentan terhadap ancaman terjadinya disintegrasi.

Sebagai gambaran bahwa Indonesia saat ini terlibat dari usaha untuk melakukan kebangkitan kembali dari krisis (*Crisis Recovery*) multidimensional, pembentukan *Asean Charter*, sampai dengan pembaharuan PBB (*UN Reform*).

Integritas sebagian pemimpin di negara kita kerap diragukan. Antara lain ditandai pemimpin kita banyak

tersandung masalah korupsi, narkoba, gratifikasi atau pornografi. Ujung-ujungnya sel penjara tidak pernah sepi kedatangan penghuni baru dari kalangan pemimpin, mulai dari pemimpin organisasi, desa, kabupaten, gubernur, kementerian, bahkan pemimpin perusahaan yang ujung-ujungnya menjadi bebas

Situasi bangsa sedang dalam kesulitan, terkoyak oleh berbagai konflik, kehilangan kepercayaan dan semangat, akibatnya harapan adalah barang langka yang kini sulit dicari. Jika *opinion leader* berbicara dengan nada pesimis tentang masa depan bangsa, apa dan siapa yang dapat memberi inspirasi, motivasi, dan kegairahan untuk menuju kehidupan yang lebih baik di masa depan atau bahkan melalui contoh (*leadership by example*) dimana, kapan dan siapa?

Sikap pesimis tidak akan pernah memberi kontribusi terhadap perbaikan di hari depan. Bangsa ini membutuhkan harapan, membutuhkan sebuah "mimpi" indah tentang Indonesia di masa datang. Sebuah gambaran mental yang dapat memberi inspirasi, membangkitkan antusiasme, memacu semangat, meraih komitmen, dan menggerakkan ke arah kehidupan yang lebih baik. Mimpi itu bernama visi untuk mewujudkan kehidupan "serba harmonis".

Ini adalah tantangan besar bagi Presiden siapa pun itu, bagaimana memimpin bangsa ini berlandaskan sebuah visi (*visionary leadership*). Kepemimpinan yang dapat mengangkat "mimpi" bersama tentang kemegahan Indonesia di masa depan. Visi yang dapat membangkitkan harapan,

menyulut semangat, dan beranjak dari kegetiran masa kini.

Mimpi yang bernama visi itu, seperti diungkap Tichy dan Devana, harus mengandung dua elemen penting. Pertama, sebuah kerangka kerja konseptual untuk memahami tujuan serta bagaimana mencapainya; Kedua, adalah sisi emosionalnya, yang dapat memberi inspirasi dan membangkitkan semangat.

Selain itu, sebuah visi, kata Nanus, juga harus realistis, dipercaya, dan mempunyai daya tarik masa depan. Visi adalah jembatan antara masa kini dan masa depan, sehingga harus realistis sekaligus idealistik. Realistik dalam arti berpijak pada kenyataan dan orang percaya bahwa mimpi itu dapat diraih. Idealistik dalam arti visi harus menyiratkan aspirasi yang tinggi agar dapat memacu orang untuk berupaya keras melakukan yang terbaik dalam rangka mencapai cita-cita yang digambarkan dalam visi.

Visi juga harus memiliki daya tarik luar biasa, agar orang terinspirasi dan termotivasi visi itu. Di tangan seorang pemimpin, visi itu diharapkan dapat menjadi *energizer*, dan menciptakan antusiasme. Pada hakikatnya kepemimpinan yang visioner adalah kepemimpinan yang mampu untuk menciptakan dan mengartikulasikan sebuah visi yang realistis, kredibel, dan mendorong para pengikutnya untuk tumbuh dan berkembang menuju masa depan.

Pada hakikatnya, visi bangsa merupakan artikulasi dari aspirasi bangsa terhadap masa depannya, sehingga agar visi ini benar-benar

mampu menjalankan fungsinya, visi harus bertumpu pada masa depan. Dengan demikian, visi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memang harus selalu bersifat kontekstual. Artinya, selalu berada dalam posisi "apa yang hendak kita capai".

Visi bangsa seolah fatamorgana, karena ketika kita berdiri dalam suatu keadaan yang telah sesuai dengan apa yang telah dirumuskan berdasarkan persepsi waktu itu, penafsirannya akan berubah sesuai yang bergerak dinamis. Ketika Mukadimah UUD 1945 dirumuskan, kata merdeka dalam konteks saat itu adalah lepas dari penjajahan. Kata merdeka saat ini juga dapat diartikan kemerdekaan sebagai individu, yang dalam konteks masa kini adalah kemerdekaan dalam arti hak asasi manusia. Demikian pula makna "kedaulatan", penafsiran saat ini tentu sudah bergeser berkaitan dengan globalisasi.

Tugas pemimpin adalah melakukan interpretasi visi bangsa yang sudah baku itu, secara kontekstual sesuai situasi dan kondisi saat dia menjadi pemimpin. Jadi, visi kepemimpinan merupakan reaktualisasi visi bangsa.

Visi kepemimpinan adalah upaya untuk mengartikulasikan masa depan yang diinginkan sehingga semua bergerak ke arah yang sama. Perumusan visi harus jelas, tidak menimbulkan keraguan dalam penafsiran dan mudah dimengerti. Visi diharapkan selalu melekat dalam kehidupan sehari-hari, perumusan visi juga harus mudah diingat, menarik, dan memberi inspirasi. Agar dapat memacu semangat, visi juga harus menantang,

merupakan sumber inspirasi untuk berupaya lebih baik, stabil sekaligus fleksibel, serta dapat diimplementasikan dan dituangkan secara eksplisit.

Terkait dengan pembangunan kemandirian bangsa dan kedaulatan bangsa, MPR telah merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Ketetapan tersebut dapat dijadikan acuan bagi pemimpin bangsa karena telah memberikan fokus dan arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang lebih baik melalui upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Semua itu, bukanlah pekerjaan mudah, diperlukan adanya niat baik semua pemimpin bangsa maupun partisipasi aktif segenap komponen bangsa untuk membantu merealisasikan amanat tersebut.

Penutup

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa pembangunan kemandirian bangsa terkait dengan pembangunan kedaulatan bangsa. Kedaulatan bangsa dalam semua bidang harus ada dalam rangka menjamin tumbuhnya kemandirian bangsa Indonesia. Ketika kedaulatan bangsa atas sumber daya yang ada di dalamnya dapat kita jaga maka kemandirian bangsa dapat kita lakukan pula terhadap sumber daya tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka apabila dihubungkan dengan tantangan masa depan Indonesia yang disebutkan dalam Ketetapan

MPR nomor VII tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, pemimpin nasional Indonesia haruslah memiliki karakter khusus unggul, progresif, dan perspektif dengan keterbukaan dan capaian atau lebih komprehensif jika ujungnya bermuara pada keunggulan model kepemimpinan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang *sidiq*, amanah dan fatonah

Daftar Pustaka

- Adi Sujatno (cet. Keempat), 2007, *Moral dan Etika Kepemimpinan*, Team 4AS, Jakarta.
- Heene, Aime dkk, *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*, Refika Aditama, Bandung 2010.
- Ide Anak Agung Gde Agung. 1973. *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965*. Paris: Mouton & Co.
- Morgenthu J. Hans. 1978. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf.
- Ryass Rasyid, Prof. DR., MA, 1995, *Konsep Dasar Kepemimpinan Pemerintahan*, Yayasan Karya Dharma, IIP, Jakarta.
- Soedarsono Mertoprawiro, 1982. *Implementasi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Indonesia Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, PN. Jakarta: Balai Pustaka,.
- Sondang P. Siagian, cet ketiga, 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta.